

Pengaruh Kemiskinan Terhadap Stabilitas Pangan di Indonesia: Analisis Dampak Ekonomi dan Sosial

Fandi Ahmad Zain¹, Herly Febri Fathiha², Nurkomaria³, Reni Ria Armayani Hasibuan⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia^{1,2,3}

Corresponding Author: fandiahmadzain08@gmail.com^{1*}, herlyfebri1@gmail.com²,
nurkomaria2020@gmail.com³, reniriaarmayani@uinsu.ac.id⁴

Info Artikel

Submitted: 03 Januari 2026

Revised : 08 Januari 2026

Accepted: 15 Januari 2026

Published: 17 Januari 2026

Keywords: Poverty, Food Stability, Food Security, Regional Disparities, Public Policy.

Kata Kunci: Kemiskinan, Stabilitas Pangan, Ketahanan Pangan, Ketimpangan Wilayah, Kebijakan Publik.

Abstract

Poverty and food stability are interrelated structural problems that remain major challenges to development in Indonesia. Although national poverty rates show a downward trend, low-income households still experience ongoing food insecurity, mainly due to limited purchasing power, food price fluctuations, and regional disparities. This study aims to analyze the impact of poverty on food stability in Indonesia by examining the accompanying economic and social impacts. Using a descriptive qualitative approach, this study examines empirical studies on the impact of poverty on food stability in Indonesia within an economic and social framework. The results show that poverty has a significant effect on food security through limited income, high proportion of food expenditure, and low adaptive capacity of poor households in facing economic, social, and environmental shocks. Social factors, such as education level, food and nutrition literacy, and household characteristics, act as mediating factors that reinforce food security vulnerability. In addition, there are differences in vulnerability patterns between urban and rural areas, but both are equally vulnerable to food instability due to poverty and regional inequality. This study confirms that food stability cannot be achieved sustainably without the integration of poverty alleviation policies, strengthening purchasing power, and developing an inclusive food system. These findings are expected to form the basis for the formulation of more comprehensive and long-term public policies aimed at achieving food stability and social justice in Indonesia.

Abstrak

Kemiskinan dan stabilitas pangan merupakan persoalan struktural yang saling berkaitan dan masih menjadi tantangan utama pembangunan di Indonesia. Meskipun angka kemiskinan nasional menunjukkan tren penurunan, ketidakstabilan akses pangan yang berkelanjutan masih dialami oleh rumah tangga berpendapatan rendah, terutama akibat keterbatasan daya beli, fluktuasi harga pangan, dan ketimpangan wilayah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap stabilitas pangan di Indonesia dengan meninjau dampak ekonomi dan sosial yang menyertainya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menelaah studi empiris mengenai dampak kemiskinan terhadap stabilitas pangan di Indonesia dalam kerangka ekonomi dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap stabilitas pangan melalui keterbatasan pendapatan, tingginya proporsi pengeluaran pangan, serta rendahnya kapasitas adaptasi rumah tangga miskin dalam menghadapi guncangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Faktor sosial, seperti tingkat pendidikan, literasi pangan dan gizi, serta karakteristik rumah tangga, berperan sebagai faktor mediasi yang memperkuat kerentanan stabilitas pangan. Selain itu, terdapat perbedaan pola kerentanan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, namun keduanya sama-sama rentan terhadap

ketidakstabilan pangan akibat kemiskinan dan ketimpangan wilayah. Penelitian ini menegaskan bahwa stabilitas pangan tidak dapat dicapai secara berkelanjutan tanpa integrasi kebijakan pengentasan kemiskinan, penguatan daya beli, dan pembangunan sistem pangan yang inklusif. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan publik yang lebih komprehensif dan berorientasi jangka panjang dalam mewujudkan stabilitas pangan dan keadilan sosial di Indonesia.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Kemiskinan dan stabilitas pangan merupakan dua persoalan struktural yang saling berkaitan dan hingga kini masih menjadi tantangan utama pembangunan di Indonesia. Meskipun secara agregat angka kemiskinan nasional menunjukkan tren penurunan, ketimpangan akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi masih dialami oleh sebagian besar rumah tangga berpendapatan rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan stabilitas pangan, khususnya pada dimensi akses dan keberlanjutan konsumsi pangan. Stabilitas pangan menjadi krusial karena berkaitan dengan kemampuan individu dan rumah tangga untuk mempertahankan pemenuhan kebutuhan pangan dalam jangka panjang, terutama ketika menghadapi guncangan ekonomi dan sosial seperti inflasi harga pangan, krisis ekonomi, maupun perubahan iklim. Dalam kerangka ketahanan pangan, stabilitas pangan merupakan salah satu pilar utama selain ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Stabilitas pangan menekankan keberlanjutan akses pangan yang tidak terganggu oleh fluktuasi ekonomi, konflik sosial, atau bencana alam. Namun, rumah tangga miskin cenderung berada pada posisi yang paling rentan terhadap gangguan tersebut karena keterbatasan pendapatan, rendahnya aset produktif, dan ketergantungan pada pasar pangan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan yang tinggi berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya kerawanan pangan, baik di tingkat rumah tangga maupun wilayah, terutama di daerah dengan infrastruktur dan perlindungan sosial yang terbatas (Salsabila *et al.*, 2025).

Penelitian empiris terkini di Indonesia menegaskan bahwa kemiskinan memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan ketahanan dan stabilitas pangan. Studi berbasis data panel provinsi menemukan bahwa peningkatan tingkat kemiskinan berdampak pada menurunnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan yang layak, sementara faktor ekonomi lain seperti *output*

pertanian dan instrumen distribusi sosial berperan dalam memperbaiki kondisi tersebut (Salsabila *et al.*, 2025). Selain itu, Pratama *et al.* (2024) menyoroti bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan di Indonesia masih cenderung berjalan secara parsial, sehingga belum mampu mengatasi kerawanan pangan secara simultan dan berkelanjutan. Dari perspektif ekonomi politik, kemiskinan dan stabilitas pangan juga dipengaruhi oleh struktur kebijakan, distribusi sumber daya, serta dinamika sosial ekonomi antarwilayah. Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, keterbatasan akses pasar, serta fluktuasi harga pangan nasional memperbesar risiko ketidakstabilan pangan bagi kelompok miskin. Penelitian mutakhir menegaskan bahwa rumah tangga miskin di wilayah urban maupun perdesaan menghadapi risiko yang berbeda, namun sama-sama rentan terhadap guncangan ekonomi yang berdampak langsung pada konsumsi pangan (Ruddin & Noor, 2025). Meskipun berbagai penelitian telah membahas hubungan antara kemiskinan dan ketahanan pangan, sebagian besar studi masih berfokus pada aspek ketersediaan dan akses pangan, sementara dimensi stabilitas pangan belum dikaji secara mendalam dalam kerangka dampak ekonomi dan sosial secara simultan. Selain itu, masih terbatas kajian yang secara spesifik menganalisis bagaimana kemiskinan memengaruhi stabilitas pangan dalam konteks Indonesia dengan mempertimbangkan faktor ekonomi makro dan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menjelaskan keterkaitan tersebut secara komprehensif guna mengisi celah literatur yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap stabilitas pangan di Indonesia dengan meninjau dampak ekonomi dan sosial yang menyertainya. Secara khusus, penelitian ini berupaya mengidentifikasi sejauh mana tingkat kemiskinan memengaruhi keberlanjutan akses pangan, serta faktor-faktor ekonomi dan sosial yang memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme kemiskinan dalam memengaruhi stabilitas pangan. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian tentang kemiskinan dan stabilitas pangan dengan pendekatan analisis yang lebih integratif. Dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan publik yang lebih efektif, khususnya dalam mengintegrasikan strategi pengentasan kemiskinan dengan upaya peningkatan stabilitas pangan nasional. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada pembangunan pangan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji pengaruh kemiskinan terhadap stabilitas pangan di Indonesia dalam konteks dampak ekonomi dan sosial. Pendekatan ini dipilih karena hubungan antara kemiskinan dan stabilitas pangan bersifat kompleks, multidimensional, dan dipengaruhi oleh faktor struktural serta kebijakan publik, sehingga memerlukan analisis kontekstual yang mendalam. Data penelitian bersumber dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen resmi relevan yang dipilih berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan tahun publikasi. Dengan metode ini, penelitian bertujuan menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang pengaruh kemiskinan terhadap stabilitas pangan di Indonesia serta menghasilkan temuan yang relevan sebagai dasar perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan dan penguatan stabilitas pangan secara berkelanjutan (Fatimah *et al.*, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan faktor struktural utama yang memengaruhi stabilitas pangan di Indonesia melalui mekanisme ekonomi dan sosial yang saling berkaitan. Stabilitas pangan pada tingkat rumah tangga miskin tidak semata-mata ditentukan oleh kecukupan pasokan pangan secara nasional, tetapi sangat bergantung pada kemampuan rumah tangga dalam mempertahankan akses pangan secara berkelanjutan di tengah berbagai guncangan ekonomi dan sosial. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa stabilitas pangan merupakan dimensi ketahanan pangan yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi, khususnya pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Sejalan dengan itu, Salsabila *et al.* (2025) menegaskan bahwa kemiskinan menjadi determinan utama kerentanan pangan di Indonesia, bahkan ketika ketersediaan pangan nasional relatif mencukupi.

Secara ekonomi, hasil kajian menunjukkan bahwa keterbatasan pendapatan dan rendahnya daya beli menjadi mekanisme utama yang menjelaskan hubungan antara kemiskinan dan ketidakstabilan pangan. Rumah tangga miskin di Indonesia cenderung mengalokasikan proporsi pendapatan yang sangat besar untuk konsumsi pangan, sehingga fluktuasi harga pangan terutama pangan pokok secara langsung berdampak pada penurunan kuantitas dan kualitas konsumsi. Kondisi ini mendorong rumah tangga miskin melakukan strategi penyesuaian konsumsi yang bersifat defensif, seperti mengurangi porsi makan, mengganti pangan bergizi dengan pangan murah, atau menghilangkan variasi konsumsi. Pola tersebut meningkatkan risiko kerawanan pangan dalam jangka menengah dan panjang. Temuan ini konsisten dengan penelitian Hannida & Sambodo (2025)

yang menunjukkan bahwa kemiskinan, ketika dikombinasikan dengan tekanan harga pangan dan keterbatasan produksi, secara signifikan memperburuk kondisi ketahanan pangan nasional. Studi tersebut juga menegaskan bahwa peningkatan produksi pangan tidak serta-merta meningkatkan keamanan pangan apabila akses ekonomi rumah tangga miskin tetap terbatas.

Temuan penelitian ini diperkuat oleh bukti empiris lain yang menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Indonesia masih berada dalam kondisi tidak tahan pangan meskipun indikator makro menunjukkan kecukupan pasokan pangan nasional. Analisis determinan ketahanan pangan rumah tangga dengan pendekatan multilevel menunjukkan bahwa variabel sosial ekonomi, seperti tingkat pendidikan, usia kepala rumah tangga, dan karakteristik rumah tangga, berpengaruh signifikan terhadap status ketahanan pangan (Oktalia *et al.*, 2025). Variabel-variabel tersebut berperan sebagai faktor mediasi antara kemiskinan dan kemampuan rumah tangga dalam mempertahankan stabilitas akses pangan, sehingga rumah tangga miskin dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah cenderung mengalami ketidakstabilan pangan yang lebih tinggi.

Selain faktor ekonomi, dimensi sosial terbukti memperkuat kerentanan stabilitas pangan rumah tangga miskin. Keterbatasan akses terhadap pendidikan, rendahnya literasi pangan dan gizi, serta minimnya akses terhadap informasi dan jaringan sosial membatasi kapasitas adaptasi rumah tangga miskin dalam menghadapi guncangan pangan. Rumah tangga dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki pola konsumsi yang kurang beragam dan kurang bergizi, sehingga stabilitas pangan tidak hanya terganggu dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas konsumsi. Temuan ini sejalan dengan Fatimah *et al.* (2023) yang menunjukkan bahwa kemiskinan berdampak langsung terhadap kualitas konsumsi pangan dan keberlanjutan pemenuhan gizi, yang pada akhirnya berimplikasi pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat miskin. Temuan serupa juga dilaporkan oleh studi terkait konsumsi pangan di Indonesia yang menemukan bahwa rendahnya diversifikasi konsumsi dan pola pangan masih didominasi oleh komoditas pokok berkaitan erat dengan kondisi ekonomi rumah tangga dan kualitas konsumsi pangan yang buruk (Samosir *et al.*, 2023).

Dari perspektif spasial, hasil penelitian menunjukkan adanya variasi kerentanan stabilitas pangan antarwilayah. Rumah tangga miskin di wilayah perkotaan cenderung lebih rentan terhadap fluktuasi harga pangan akibat ketergantungan penuh pada mekanisme pasar dan tingginya volatilitas harga. Sebaliknya, rumah tangga miskin di wilayah perdesaan meskipun relatif dekat dengan sumber produksi pangan, tetap menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses pasar, teknologi pertanian, serta produktivitas yang rendah. Kondisi tersebut menyebabkan stabilitas pangan di wilayah perdesaan juga tetap rapuh. Temuan ini sejalan dengan Juliannisa *et al.*, (2025) yang

menekankan bahwa kemiskinan dan ketimpangan wilayah merupakan faktor utama kerentanan pangan di Indonesia, baik di wilayah urban maupun perdesaan.

Dalam konteks kebijakan publik, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan di Indonesia masih belum terintegrasi secara optimal dalam kerangka stabilitas pangan jangka panjang. Program bantuan pangan dan perlindungan sosial memang berperan penting dalam menjaga akses pangan dalam jangka pendek, namun efektivitasnya dalam menjamin stabilitas pangan jangka panjang masih terbatas. Penelitian Mustofa *et al.* (2023) menunjukkan bahwa program subsidi pangan seperti Raskin belum memberikan dampak signifikan terhadap struktur pengeluaran pangan rumah tangga miskin dalam jangka panjang, meskipun mampu meringankan beban konsumsi sementara. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pangan yang bersifat konsumtif perlu diimbangi dengan strategi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas rumah tangga miskin.

Lebih lanjut, Pratama *et al.* (2024) menegaskan bahwa pendekatan kebijakan yang bersifat sektoral menyebabkan intervensi pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan berjalan secara parsial, sehingga belum mampu mengurangi kerentanan pangan secara simultan dan berkelanjutan. Hambatan implementasi kebijakan di tingkat lokal, seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan dan ketidaksesuaian desain kebijakan dengan kondisi wilayah, semakin memperlemah efektivitas kebijakan pangan dan kemiskinan (Aprianto, 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa stabilitas pangan tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pangan itu sendiri, tetapi juga oleh tata kelola kebijakan sosial dan ekonomi secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kemiskinan memperlemah kapasitas rumah tangga dalam menghadapi risiko multidimensi, seperti krisis ekonomi, perubahan iklim, dan gangguan distribusi pangan. Rumah tangga miskin umumnya tidak memiliki cadangan pangan maupun cadangan keuangan, sehingga stabilitas pangan sangat bergantung pada kondisi eksternal yang berada di luar kendali mereka. Studi global menegaskan bahwa kemiskinan dan perubahan iklim saling berinteraksi untuk memperburuk kerentanan pangan pada rumah tangga miskin di banyak negara berkembang, karena kelompok ini memiliki kapasitas adaptasi yang rendah terhadap guncangan eksternal seperti krisis ekonomi dan gangguan distribusi pangan (Dossa & Miassi, 2025).

Secara teoretis, temuan penelitian ini memperkuat pendekatan multidimensional dan ekonomi politik pangan yang menempatkan stabilitas pangan sebagai hasil interaksi antara struktur kemiskinan, distribusi sumber daya, dan kebijakan publik. Kemiskinan tidak hanya dipahami

sebagai kekurangan pendapatan, tetapi sebagai kondisi struktural yang membatasi akses terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik yang diperlukan untuk menjamin stabilitas pangan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kerangka ketahanan pangan konvensional dengan menekankan bahwa stabilitas pangan harus dianalisis secara simultan dalam dimensi ekonomi dan sosial, bukan sekadar sebagai turunan dari ketersediaan pangan nasional.

Dari sisi kebaruan, penelitian ini menegaskan pentingnya stabilitas pangan sebagai indikator kunci dalam evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Selama ini, keberhasilan kebijakan sering diukur melalui penurunan angka kemiskinan dan peningkatan produksi pangan, tanpa mempertimbangkan keberlanjutan akses pangan rumah tangga miskin. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan pengungkapan mekanisme tersembunyi yang menghubungkan kemiskinan dengan ketidakstabilan pangan, termasuk peran fluktuasi harga, keterbatasan sosial, ketimpangan wilayah, dan fragmentasi kebijakan.

Secara praktis, hasil penelitian ini mengimplikasikan perlunya kebijakan yang lebih terintegrasi dan berorientasi jangka panjang dalam mengatasi kemiskinan dan memperkuat stabilitas pangan. Upaya pengentasan kemiskinan perlu disinergikan dengan penguatan daya beli, diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga miskin, peningkatan literasi pangan dan gizi, serta pembangunan sistem pangan yang inklusif dan adaptif terhadap guncangan ekonomi dan sosial. Pendekatan kebijakan yang komprehensif dan inklusif tersebut diharapkan mampu menciptakan stabilitas pangan yang berkelanjutan sekaligus mendukung pembangunan sosial ekonomi yang lebih adil di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan faktor struktural utama yang secara signifikan memengaruhi stabilitas pangan di Indonesia melalui mekanisme ekonomi dan sosial yang saling berkaitan. Stabilitas pangan rumah tangga miskin tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pangan nasional, tetapi terutama oleh kemampuan rumah tangga dalam mempertahankan akses pangan secara berkelanjutan di tengah berbagai guncangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Rendahnya pendapatan, tingginya proporsi pengeluaran pangan, serta keterbatasan daya beli menyebabkan rumah tangga miskin sangat rentan terhadap fluktuasi harga pangan, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor sosial, seperti tingkat pendidikan, literasi pangan dan gizi, serta karakteristik rumah tangga, berperan sebagai faktor

mediasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara kemiskinan dan stabilitas pangan. Rumah tangga miskin dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah cenderung memiliki pola konsumsi yang kurang beragam dan kurang bergizi, sehingga stabilitas pangan tidak hanya terganggu dari sisi keberlanjutan akses, tetapi juga kualitas pemenuhan gizi. Selain itu, terdapat perbedaan kerentanan stabilitas pangan antarwilayah, di mana rumah tangga miskin di wilayah perkotaan lebih rentan terhadap volatilitas harga pangan akibat ketergantungan pada pasar, sementara rumah tangga miskin di wilayah perdesaan menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan produktivitas pertanian yang rendah.

Dalam konteks kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa program perlindungan sosial dan bantuan pangan yang ada masih berperan dominan dalam menjaga akses pangan jangka pendek, namun belum cukup efektif dalam menjamin stabilitas pangan jangka panjang. Fragmentasi kebijakan, pendekatan sektoral, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal menjadi hambatan utama dalam upaya mengintegrasikan pengentasan kemiskinan dengan penguatan stabilitas pangan. Temuan ini menegaskan bahwa stabilitas pangan tidak dapat dicapai secara optimal tanpa sinergi kebijakan ekonomi, sosial, dan pangan yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat pendekatan multidimensional dan ekonomi politik pangan dengan menempatkan stabilitas pangan sebagai hasil interaksi antara kemiskinan struktural, ketimpangan wilayah, dan tata kelola kebijakan publik. Dari sisi praktis, penelitian ini merekomendasikan perlunya perumusan kebijakan yang lebih terintegrasi antara pengentasan kemiskinan dan penguatan stabilitas pangan, melalui peningkatan daya beli rumah tangga miskin, diversifikasi sumber pendapatan, penguatan literasi pangan dan gizi, serta pembangunan sistem pangan yang inklusif dan adaptif terhadap guncangan ekonomi dan sosial. Dengan pendekatan tersebut, stabilitas pangan yang berkelanjutan diharapkan dapat tercapai sebagai bagian dari pembangunan sosial ekonomi yang lebih adil dan inklusif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, A. (2025). JALAN BERLIKU MENUJU STABILITAS PANGAN: ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI TINGKAT LOKAL. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 3(10), 1–11.
- Dossa, K. F., & Miassi, Y. E. (2025). Nexus between food insecurity, poverty, and climate change: a cross-regional multifactorial analysis. *Frontiers in Environmental Economics*, 4, 1–18.
- Fatimah, A., Astuti, I. Y., Ghiffari, A. F., & Malik, A. (2023). PENGARUH KEMISKINAN

- TERHADAP STABILITAS PANGAN DI PROVINSI LAMPUNG; TANTANGAN DAN SOLUSI. *IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 01(01), 115–120.
- Hannida, C. P., & Sambodo, H. (2025). ANALYSIS OF THE EFFECT OF RICE PRODUCTION, POVERTY, AND PREVALENCE OF UNDERNOURISHMENT (POU) ON FOOD SECURITY IN INDONESIA. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 22(1), 11–19.
- Juliannisa, I. A., Rahma, H., Mulatsih, S., & Fauzi, A. (2025). Regional Vulnerability to Food Insecurity: The Case of Indonesia. *Sustainability*, 17(11), 1–20.
- Mustofa, Sugiyanto, C., & Susanto, A. A. (2023). Analysis of the Impact of the Raskin Program on Food Security for Poor Households in Indonesia. *Jurnal Economica*, 19(1), 127–140.
- Oktalia, H. J., Mulyani, W. P., & Pitoyo, A. J. (2025). Determinan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Indonesia: Suatu Pendekatan Multilevel (Determinants of Household Food Security in Indonesia: A Multilevel Approach). *Jurnal Pangan*, 34(2), 151–168.
- Pratama, S. D., Muid, R. A., & Damayanti, K. N. (2024). From Measurement to Action: Initiating the Simultaneous Alleviation of Poverty and Food Insecurity Policy in Indonesia. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*, 4(2), 191–201.
- Ruddin, M. F., & Noor, N. H. M. (2025). FOOD SECURITY IN INDONESIA: ACHIEVING SDG TARGET 2.2 - END ALL FORMS OF MALNUTRITION. *International Journal of Politics, Public Policy and Social Work*, 7(17), 1–22.
- Salsabila, A. A., Nurasyiah, A., & Firmansyah. (2025). The Impact of Zakat, Agricultural Output, and Poverty on Indonesia's Food Security. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 14(2), 549–562.
- Samosir, O. B., Radjiman, D. S., & Aninditya, F. (2023). Food consumption diversity and nutritional status among children aged 6-23 months in Indonesia: The analysis of the results of the 2018 Basic Health Research. *PLOS ONE*, 18(3), 1–13.